

Kambuaya Diminta Reformasi KLH

Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya diminta melakukan reformasi total terhadap institusi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pasalnya, selama ini lembaga tersebut hanya menjadi alat pemilik perusahaan pencemar lingkungan. "Menteri yang baru (Kambuaya) harus mereformasi total institusi KLH karena selama ini dijadikan *greenwashing* perusahaan-perusahaan perusak lingkungan," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Berry Nahdian Furqan, kepada *Jurnal Nasional*, Jumat (21/10).

Selain itu, Berry juga mendesak Menteri Lingkungan Hidup baru untuk melakukan pengarusutamaan terhadap kebijakan yang prolingkungan hidup dengan melakukan penegakkan terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) Nomor 32 Tahun 2009.

"(Menteri baru) juga mesti berani menabrak berbagai kebijakan yang merusak dan menghancurkan lingkungan," ujarnya. Kambuaya juga diminta menyelesaikan beberapa kasus lingkungan seperti Lapindo, Freeport, dan Newmont. "Newmont sedang digugat oleh Walhi," ujarnya.

Seperti diketahui, Walhi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat (Pemda KSB) menggugat Kementerian Lingkungan Hidup. Gugatan tersebut terkait perpanjangan izin pembuangan tailing (limbah sisa pengolahan tambang) milik PT Newmont Nusa Tenggara yang dibuang ke Teluk Senunu, Sumbawa Barat. Gugatan dengan nomor perkara 145 ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN), September lalu.

Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Bintang Reformasi (PBR) Kalimantan Selatan, Riduansyah, meminta Meneg LH yang baru melanjutkan gebrakan penertiban masalah lingkungan. "Gebrakan penertiban lingkungan hidup oleh Menega LH terdahulu hendaknya terus berlanjut dan lebih ditingkatkan," katanya di Banjarmasin, Jumat seperti dikutip *Antara*.

Menurut Ketua Fraksi Partai Bintang Reformasi (PBR) DPRD Kalsel itu, perhatian Gusti HM Hatta yang mantan Pembantu Rektor I bidang akademis Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin tersebut saat menjadi Meneg LH, cukup tinggi terhadap permasalahan lingkungan. Sebagai contoh, di tempat kelahirannya sendiri yaitu Kalsel, melalui gebrakan Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Kemeneq LH) terbongkar belasan dokumen Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) bodong, di Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).

Sebagai tindaklanjut temuan tersebut, Kemeneq LH juga merekomendasi pembubaran Komisi Amdal kabupaten setempat, karena terkesan asal-asalan melakukan kajian serta diduga ada oknum yang terlibat atas terbitnya dokumen Amdal bodong itu. Ia juga berharap, secara umum para menteri tersebut agar lebih meningkatkan perhatian kepada daerah. Perhatian dimaksud berkaitan dengan upaya percepatan pembangunan daerah dan menghilangkan kesan penganaktirian.

"Seperti ada daerah yang seakan mendapat perhatian penuh dari pemerintah pusat dan ada pula yang kurang mendapatkan perhatian," kata Riduansyah. n Very Herdiman